JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK
SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA

LAPORAN PENELITIAN

STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA PADANG DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF 2004

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL. : 20 DESEMBER 2005
SUMBER HARGA : H
KOLEKSI : KI
No. INVENTARIS : 291 / K / 2005 - S.(1)
KLASIFIKASI : 324.204 072 NUR -S

Oleh :

Drs. Nurman S., M.Si.
Dra. Al Rafni, M.Si.

DIBIAYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN SURAT PERJANJIAN KONTRAK
NOMOR : 872/J41/KU/DIPA/2005, TANGGAL 02 MEI 2005

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOPEMBER, 2005

Halaman Pengesahan Penelitian Dana DIKS UNP

1. a. Judul Penelitian	Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004
b. Bidang Studi	Ilmu Politik
c. Kategori	II
2. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap dan Gelar	Drs. Nurman S, M.Si.
b. Jenis Kelamin	Perempuan
c. Gol. Pangkat dan NIP	Penata/III c ; 131
d. Jabatan Fungsional	Lektor
e. Jabatan Struktural	---
f. Fakultas/Jurusan	Fakultas Ilmu-ilmu Sosial / Ilmu Sosial Politik
3. Jumlah Anggota Peneliti	1 orang
Nama Anggota	Dra. Al Rafni, M.Si.
4. Lokasi Penelitian	Kota Padang
5. Kerjasama dengan Instansi Lain	---
6. Lama Penelitian	8 bulan
7. Biaya yang diperlukan	
a. Sumber dari DIKS UNP	Rp. 5.000.000,-
b. Sumber Lain	-
Jumlah	Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Padang, 30 Nopember 2005

Mengetahui
Dekan FIS-UNP Padang ;

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
NIP. 131584117

Ketua Peneliti ;

Drs. Nurman S, M.Si.
NIP. 131486200

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang ;

Prof. Dr. Anas Yasin, MA.
NIP. 130365634

ABSTRAK

Penelitian ini beranjak dari realitas kemenangan Partai Keadilam Sejahtera (PKS) Kota Padang dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu dengan menyisihkan partai politik lainnya termasuk partai mapan seperti Golkar dan PPP. Sehubungan dengan itu maka focus penelitian ini adalah : *Bagaimanakah strategi PKS khususnya terkait dengan strategi segmentasi, targeting dan penentuan posisi dalam memenangkan pemilu legislatif 2004 di Kota Padang? Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi PKS Kota Padang, baik dalam konteks internal maupun eksternal dalam memenangkan pemilu 2009?*

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjadikan Pengurus DPD PKS Kota Padang sebagai informan penelitian. Data dikumpulkan melelui wawancara mendalam dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bingkai strategi segmentasi PKS terpusat pada lima segmen masyarakat berikut : (1) kelompok masyarakat perkotaan yaitu masyarakat modern dan berpendidikan ; (2) kelompok masyarakat pesisir pantai dengan mata pencaharian nelayan ; (3) masyarakat yang tinggal di daerah pertanian dengan mata pencaharian bertani ; (4) kalangan muda terdidik yang mempunyai inisiatif dan ikut andil dalam memperjuangkan reformasi ; dan (5) kaum perempuan yang potensial sebagai pemilih. Dari kelima segmentasi ini maka PKS memilih kelompok muda terdidik sebagai kelompok *targeting* dalam strategi pemasaran partainya. Sedangkan dalam bingkai strategi *positioning* PKS memposisikan dirinya sebagai partai kader, partai dakwah dan partai reformis.

Sementara itu peluang PKS dalam pemilu 2009 berhubungan dengan tiga faktor dominan berikut : (1) faktor pencitraan partai ; (2) faktor keanggotaan dan sistem pengkaderan ; dan (3) faktor kultur masyarakat Minangkabau. Sedangkan tantangan yang dihadapinya juga berkaitan dengan tiga faktor yaitu : (1) faktor komitmen partai ; (2) faktor *realignment* (pengalihan dukungan) ; dan (3) faktor dana.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang ***Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004***, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 872/J41/KU/DIPA/2005 Tanggal 02 Mai 2005.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi dan kesempurnaan, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosen/tenaga peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pembahas Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2005
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,

Prof. Dr. H. Anas Yasin. M.A
NIP. 130365634

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Fokus Penelitian..... 3
C. Tujuan Penelitian..... 3
D. Kontribusi Penelitian..... 3

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 4
A. Kerangka Teoritis..... 4
B. Kerangka Pemikiran..... 10

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN..... 11
A. Jenis Penelitian..... 11
B. Informan Penelitian..... 11
C. Jenis dan Sumber Data..... 12
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data..... 12
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data..... 12
F. Teknik Analisis Data..... 12

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 15
A. Hasil Penelitian..... 15
B. Pembahasan..... 44

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... 49
A. Kesimpulan..... 49
B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA..... 51

LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kota Padang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003 19

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kota Padang Menurut Kewarganegaraan dan Kecamatan Tahun 2003 20

Tabel 3 : Urutan Partai Politik Pemenang Pemilu 2004 di Kota Padang 22

Tabel 4 : Fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang Hasil Pemilu Legislatif 2004 22

Tabel 5 : Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Padang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004..... 23

Tabel 6 : Penyebaran Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2004 di 11 Kecamatan Kota Padang 24

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi politik telah membawa angin segar perubahan kehidupan politik di negeri ini. Salah satu hal yang menonjol adalah masalah partai politik. Kemunculan partai politik yang bak cendawan tumbuh di musim hujan merupakan fenomena menarik dalam kehidupan kepartaian era reformasi. Fakta menunjukkan bahwa pada pemilu 1999 tercatat sejumlah 141 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai sebuah partai dan hanya 48 partai politik yang lulus verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu (Widagdo, 1999). Hal senada juga terjadi pada pemilu 2004, dari 220 partai yang mendaftarkan diri hanya 24 partai yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut pemilu. Terdapat peningkatan yang berarti dalam hal kuantitas partai politik dari pemilu 1999 ke pemilu 2004 sekali pun terjadi pengurangan dari segi kontestan yang berhak ikut pemilu itu sendiri. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap peta kekuatan politik baik di tingkat pusat mau pun daerah.

Tidak hanya perubahan peta politik baik di tingkat pusat mau pun daerah yang menarik disigi. Hal lain yang justru lebih berdinamika yaitu mencermati banyaknya kemunculan partai-partai kecil dan perjuangannya untuk bertarung memenangkan pemilu. Partai Keadilan (PK) sebagai contoh. Partai yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 oleh sejumlah aktivis muslim Indonesia yang kebanyakan berasal dari kalangan intelektual kampus (Damanik, 2002). Meskipun merupakan partai baru, PK dalam pemilu 1999 berhasil memperoleh suara sebanyak 1.436.565 suara atau 1,36% dan berada pada peringkat ke tujuh secara nasional setelah PDI-P, Golkar, PPP, PAN, PKB dan PBB (Kompas, 27 Juli 1999). Namun berdasarkan UU No.3 tahun 1999

tentang Pemilu yang memuat ketentuan *electoral treshold* sebanyak 2% maka PK dinyatakan tidak dapat mengikuti pemilu 2004 karena tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk menghadapi pemilu 2004, PK menggabungkan diri dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penggabungan dua partai ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Majelis Syuro PK tanggal 17 April 2003 dan Keputusan Majelis Syuro PKS tanggal 18 April 2003 (Kepmen Kehakiman dan HAM RI No. M.02.UM 06.08 tahun 2003 tanggal 17 Juli). Dalam pemilu 2004 PKS muncul secara mengejutkan di tingkat nasional dan daerah. Berdasarkan hasil pemilu secara nasional PKS menempati urutan ke enam di bawah Golkar, PDI-P, PKB, PPP dan Partai Demokrat dengan perolehan suara 8.149.457 atau 7,21% dari perolehan suara secara keseluruhan (Media Indonesia, 5 Mei 2004).

Di tingkat daerah, PKS juga menunjukkan fenomena yang menarik. Ia menjadi partai yang mampu memperoleh suara secara signifikan bahkan menjadi partai pemenang di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, Bandung dan Padang.

Di Kota Padang, pada pemilu 1999 peta kekuatan politik dimenangkan oleh berturut-turut oleh PAN, Golkar, PDI-P serta PPP. Pada pemilu 2004 terjadi pergeseran peta kekuatan politik di kota ini, dimana PKS meraup suara terbanyak sebesar 57.839 atau 20,07% dari keseluruhan suara. Menyusul di bawahnya Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB, dan PDI-P (KPUD Kota Padang, 2004).

Realitas yang dipaparkan sebelumnya mempertegas pergeseran yang signifikan dalam peta kekuatan politik Kota Padang. PKS yang sebelumnya bernama PK dan hanya berada pada urutan ke tujuh pada pemilu 1999 melonjak sebagai pemenang pada pemilu legislatif 2004. Fenomena kemenangan PKS di Kota Padang menarik untuk diteliti. Bagaimana strategi yang dilakukan PKS dalam meraup suara massa pemilih serta bagaimana peluang dan tantangan bagi partai ini dalam menghadapi pemilu 2009 mendatang di Kota Padang?

B. Fokus Penelitian

Beranjak dari pemaparan latar belakang sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan berikut :

1. Bagaimanakah strategi yang dilakukan PKS Kota Padang, khususnya berkaitan dengan *strategi segmentasi, targeting dan penentuan posisi* dalam memenangkan pemilu legislatif 2004?
2. Bagaimanakah peluang dan tantangan yang dihadapi PKS dalam menghadapi pemilu 2009 di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengungkapkan hal-hal berikut :

1. Strategi yang dilakukan PKS khususnya terkait dengan segmentasi, targeting dan penentuan posisi dalam memenagkan pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
2. Peluang dan tantangan yang dihadapi PKS dalam menghadapi pemilu 2009 mendatang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap :

1. Pengembangan studi tentang partai politik guna memperkaya wacana Ilmu Politik, khususnya melengkapi informasi tentang strategi partai politik dalam menghadapi pemilu.
2. Partai politik kontestan pemilu dalam menyusun strategi dan platform politiknya guna memperoleh dukungan massa pemilih.
3. Peneliti lainnya untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam tentang partai politik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mengungkapkan strategi PKS dalam memenangkan pemilu legislatif 2004 di Kota Padang, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan partai politik dan strategi politik.

1. Partai Politik

Sebagai suatu kreasi di dalam dunia modern atau manifestasi sistem politik yang modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, partai politik hampir selalu dijumpai kehadirannya di setiap negara, sekalipun keberadaannya tersebut bersifat formal belaka. Keberadaan dari partai politik ini dapat dijumpai baik di negara yang menganut paham demokrasi maupun otoriter, baik di negara maju ataupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Bagi negara maju (dunia pertama), partai politik merupakan alat yang membuat pemerintah responsif terhadap orang-orang yang berhak memilih dalam suatu pemilihan sehingga kompetisi partai diasumsikan sebagai tanda bagi demokrasi liberal (Haque, 1993). Gagasan dasar ideologinya adalah bahwasanya rakyat berhak untuk turut berpartisipasi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum *(public policy)* (Budiardjo, 1982).

Sementara itu di negara-negara totaliter, partai politik digunakan untuk maksud-maksud rezim, yaitu antara lain sebagai alat untuk memperluas kontrol terhadap seluruh kehidupan kemasyarakatan. Maksud ini tentunya tidak terlepas dari gagasan partisipasi rakyat dalam pandangan elit politiknya, yaitu rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng (Haque, 1993). Sedangkan di negara-negara berkembang, pada umumnya partai politik merupakan

suatu gejala yang muncul sebagai reaksi atas sistem kolonial yang dipandang menindas hak-hak politik masyarakat pribumi. Dalam hal ini, di negara-negara jajahan partai politik sering didirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar dewan perwakilan rakyat kolonial, malahan partai-partai kadang kala menolak untuk duduk dalam badan itu, seperti yang pernah terjadi di India dan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi massa serta pendidikan umum, maka bertambah kuat lah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai (Budiardjo, 1997).

Melihat betapa urgennya keberadaan partai politik sebagai salah satu elemen vital dalam kehidupan politik, maka studi tentang partai politik dirasakan semakin penting. Tetapi persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana memberikan batasan-batasan dan definisi mengenai partai politik, mengingat keberadaan dan fungsinya terkadang sangat tergantung kepada kondisi dan situasi politik negara di mana partai politik itu berada. Walaupun demikian, beberapa ahli mencoba memberikan batasan-batasan dan definisi mengenai partai politik. Joseph La Palombara (1974) misalnya, mengkaitkan keberadaan partai politik dengan perjuangan elit dalam memperoleh kekuasaan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam batasannya berikut ini, *"political party is a formal organization whose self concious, primary purpose is to place and maintain in public officer persons who will control, alone or in coalition, the machinery og governement."*

Dalam hal ini, La Palombara menambahkan bahwa kontrol terhadap mesin-mesin pemerintahan dimaksudkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan formulasi, implementasi, interpretasi dan ajudikasi kebijakan-kebijakan negara. Di lain pihak, penekanan terhadap bentuk formal organisasi partai politik dimaksudkan untuk membedakannya dengan gerakan massa, kampanye-kampanye untuk mempengaruhi pendapat umum yang tidak memiliki struktur, dan bentuk-bentuk perilaku kolektif lainnya, seperti gerakan mahasiswa, unjuk rasa dan usaha-usaha

lainnya yang bertujuan menyerang calon-calon tertentu untuk menggantikannya dengan yang lain.

Selanjutnya Mark N. Hagopian (1978) memberikan batasan atau definisi partai politik dengan penekanan utama pada masalah fungsi partai dalam mempengaruhi kebijakan publik, sebagaimana terlihat dalam batasannya berikut, *"political party as an association formed to influence the content and conduct of public policy in favor of some set of ideological principles and/or interest either through direct exercise of power or by participation in election."*

Sementara itu Ramlan Surbakti (1999) melihat partai politik sebagai sekelompok anggota yang tersusun rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, serta yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Kebijakan yang dikeluarkan mereka merupakan hasil dari berbagai kepentingan masyarakat yang kemudian disusun untuk mempertahankannya melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dari pandangan-pandangan di atas maka pada dasarnya partai politik merupakan suatu organisasi atau lembaga formal yang terkait dengan usaha-usaha perjuangan kekuasaan, yaitu mempengaruhi kebijakan publik dengan jalan menempatkan dan mempertahankan orang-orang dalam jabatan kenegaraan, sehingga mereka dapat mengendalikan mesin-mesin pemerintahan.

Pada prinsipnya setiap partai politik di dalam menjalankan aktifitasnya, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, yang dengan sendirinya tentu berbeda aksentuasinya antara satu partai dengan partai lainnya. Dalam konteks ini, di dalam menjalankan fungsinya suatu partai politik akan sangat bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejarnya (Mas'oed dan Collin MacAndrews, 1978).

Jika demikian adanya, apa dan bagaimanakah fungsi dari partai politik itu? Beberapa ahli memberikan pandangannya mengenai hal ini. Rodee (1957) misalnya, memandang fungsi partai politik sebagai *"...the broker between the citizen and his government, its translete issues, ... in to public policy"*. Begitu pula halnya dengan Truman (1960) melihat fungsi partai sebagai "instrumen" perantara.

Sementara itu, Macridis (1967) menggolongkan fungsi partai politik ke dalam fungsi perwakilan (dan perantara), konversi dan agregasi, integrasi (meliputi partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pimpinan, deliberasi dan formulasi kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah. Sedangkan Haque (1993) mengklasifikasikan fungsi partai politik sebagai berikut : *Pertama,* (yang paling penting) sebagai sarana atau mata rantai antara penguasa dan rakyat. Dalam hal ini partai berfungsi sebagai saluran ekspresi antara yang menguasai dengan yang dikuasai. *Kedua,* partai sebagai agen penting untuk agregasi kepentingan *(interest agregation). Ketiga,* di dalam pemerintahan, pemimpin partai merupakan pusat kebutuhan dalam rangka mengimplementasikan tujuan-tujuan kolektif dari masyarakat. *Keempat,* berfungsi sebagai agen rekrutmen elit dan sosialisasi. *Kelima,* partai politik seringkali dipandang sebagai objek pelengkap dari kekuatan emosional yang kuat atau antagonisme, yang mempunyai pengaruh atas opini dan perilaku dari supporter (pemilih) mereka.

Selanjutnya Almond merumuskan fungsi partai politik ke dalam delapan poin, yaitu masing-masing : (1) sebagai sarana komunikasi politik ; (2) sebagai sarana sosialisasi politik ; (3) sebagai sarana rekrutmen politik ; (4) sebagai sarana pengatur konflik ; (5) sebagai sarana partisipasi politik ; (6) sebagai sarana artikulasi kepentingan ; (7) sebagai sarana agregasi kepentingan ; dan (8) sebagai sarana pembuatan kebijakan (Mas'oed dan MacAndrews, 1978).

Pandangan-pandangan di atas, memberikan gambaran betapa banyak dan beragamnya fungsi-fungsi dari partai politik. Namun secara umum, pandangan

tentang fungsi partai politik tersebut mempunyai persamaan yang sangat mendasar dan fundamental sifatnya, yaitu fungsi sebagai alat penghubung, mata rantai atau perantara antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam konteks ini, suatu partai politik dapat menjadi kendaraan dari berbagai kepentingan dari para pendukungnya dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan dan menjelaskan segala kebijakan yang ditetapkan oleh pihak penguasa kepada segenap lapisan masyarakat melaksanakan fungsi komunikasi politik.

2. Strategi Politik

Pemilu tak ubahnya bagai sebuah "pasar" bagi setiap partai politik. Oleh karena itu sebuah partai politik harus mampu melakukan analisis segmentasi pasar sebagaimana halnya konsep manajemen bisnis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menemukan sifat dasar keberadaan dan keinginan pembeli yang bervariasi di pasar. Analisis ini memberikan peluang bagi organisasi untuk memadukan kemampuan bisnis dengan permintaan dari satu atau lebih kelompok konsumen secara selektif. Tiap segmen memiliki karakteristik yang sangat berbeda sehingga partai politik harus menyusun strateginya dengan gaya revolusi tidak sekadar mempertanyakan atau bersikap kritis, kreatif, tetapi membuat sesuatu yang baru. Tujuannya bukan revolusi itu sendiri, melainkan inovasi unggul yang diharapkan bisa menjadi revolusi di bidangnya.

Pada dasarnya strategi pada partai politik berhubungan dengan pemilih, pesaing dan organisasi itu sendiri. Setiap strategi terfokus pada cara-cara dimana suatu partai politik dapat membedakan dirinya dengan partai politik lainnya. Strategi dilakukan dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada para pemilihnya dalam pemilu. Dalam memenangkan pemilu pada umumnya sebuah partai telah mempunyai strategi untuk menjadi pemenang. Lebih

jauh Plano (1985) mengartikan strategi sebagai rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh.

Strategi masing-masing partai politik dalam meraup kemenangan saat pemilu berlangsung sangat ditentukan oleh ideologi dan *platform* masing-masing di mana partai politik tersebut merebut simpati pemilihnya. Dalam kaitan ini Widagdo (1999) memaparkan strategi sebuah partai politik merebut suara pada pemilu berkaitan dengan tiga hal berikut :

Pertama, segmentasi. Segmentasi yaitu suatu kelompok yang memberikan tanggapan yang sama. Segmentasi tersebut dapat dibedakan berdasarkan segmentasi geografik di mana partai politik hanya melihat berdasarkan suku, ras, propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Misalnya pada daerah yang ingin mewujudkan otonomi daerah yang diperluas, maka sebuah partai mengankat isu tentang perwujudan otonomi daerah dengan tujuan akan mendapatkan suara pada daerah pemilihan tersebut. Kemudian segmentasi demografik, di mana suatu wilayah dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, suku, profesi, pendidikan dan sebagainya. Apabila suatu daerah jumlah penduduknya mayoritas perempuan, maka isu yang "dijual" adalah pemberdayaan perempuan.

Kedua, targeting. Pemilihan kepada suatu segmen tertentu yang ingin dicapai digarap secara intensif untuk diraih sebagai pendukung utama. Apabila suatu partai ingin mendapat dukungan pemilih pemula, maka *performance* partai politik tersebut haruslah sesuai dengan "gejolak"-nya kawula muda.

Ketiga, penentuan posisi. Sebuah partai harus menentukan posisi yang berbeda dari partai lain. Hal ini dimaksudkan agar sebuah partai mendapat tempat bagi para pemilihnya. Di tengah maraknya isu penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka sebuah partai yang ingin memperoleh dukungan massa harus berada pada posisi yang bertekad untuk menghantam KKN tersebut.

Pemilu legislatif 2004 dengan nuansa pemilihan langsung sangat menuntut kejelian partai politik menerapkan strategi yang *customer oriented.* Artinya partai politik harus mampu memberikan produknya sesuai dengan selera rakyat sebagai konsumen pada segmen pasar masing-masing. Selain itu perlu pula dilakukan pengkajian terhadap kekuatan, kelemahan dan rencana pesaing. Produk baru diperlukan untuk menggantikan produk lama yang penjualan dan labanya sudah menurun. Strategi pengembangan dan penentuan posisi untuk memasuki pasar melibatkan semua fungsi bisnis. Mendengar apa kata konsumen merupakan hal penting dalam mengidentifikasikan penampilan produk dan mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam kaitan ini, partai politik yang cepat mampu merespon angin reformasi akan mendapat dukungan massa yang kuat.

B. Kerangka Pemikiran

Beranjak dari pemaparan kerangka teroitis sebelumnya serta yang menjadi fokus penelitan ini maka dapat dikonstruksikan kerangka pemikiran sebagaimana terlihat pada matriks berikut ini.

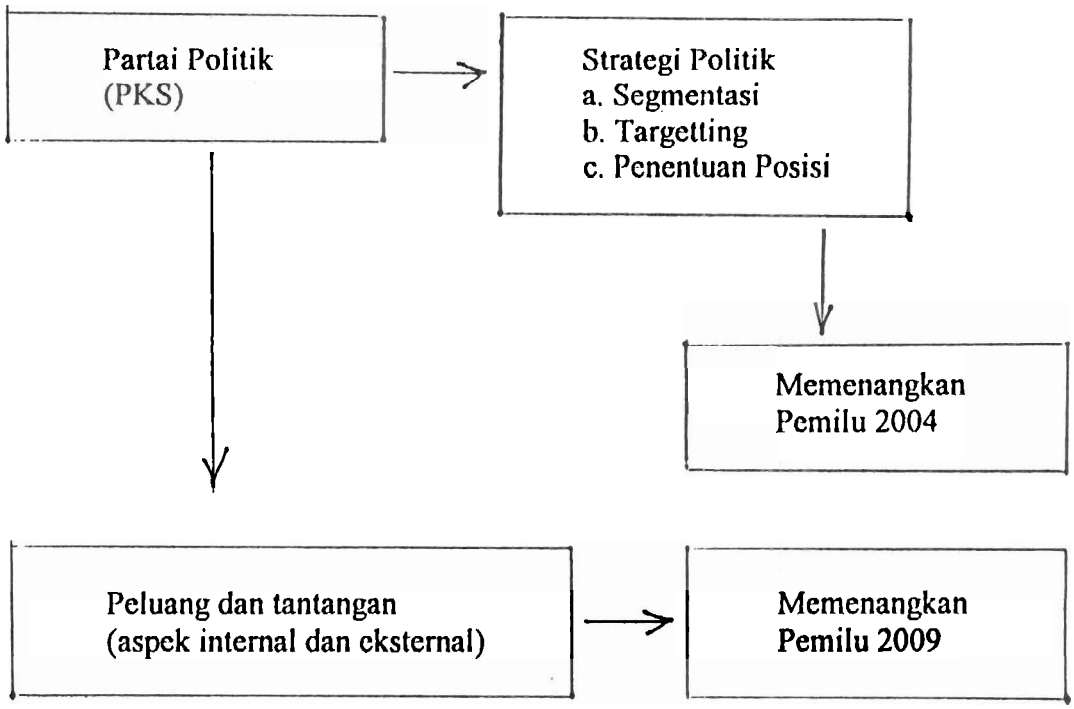

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2001). Sementara itu Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

B. Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley yang menyatakan bahwa : (1) informan telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian ; (2) informan masih terlibat aktif dan penuh pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti ; (3) informan punya cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi ; dan (4) peneliti lebih merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari informan yang asing baginya (Faisal, 1990).

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan penelitian ini adalah pengurus DPD PKS Kota Padang periode 2000-2005. Dalam konteks ini yang menjadi informan penelitian adalah Sekretaris dan Bendahara DPD PKS Kota Padang. Hal ini disebabkan karena mereka berdualah yang diberi kewenangan oleh pimpinan DPD PKS Kota Padang untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan partai termasuk yang menjadi fokus penelitian ini kepada peneliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan data primer berupa strategi yang dilakukan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2004 di Kota Padang serta peluang dan tantangan yang dihadapinya menyongsong pemilu 2009. Data ini diperoleh dari pengurus DPD PKS Kota Padang periode 2000-2005. Sementara itu data sekunder berhubungan dengan data penunjang berupa dokumentasi yang dimiliki PKS seperti sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi dan sebagainya.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Data yang akan dijaring untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam *(depth interview)* dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara dan *tape recorder.*

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Patton, triangulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data ; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metoda yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan strategi pertama.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari

gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenbergt, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1979) sebagai berikut :

1. Reduksi data.

   Data yang terkumpul dalam penelitian direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

2. Penyajian data.

   Penyajian data merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permalahan yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

   Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan proses ulang melalui tahapan yang sama.

4. Merumuskan temuan.

   Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan melalui analisis data, dirumuskan menjadi temuan umum dan temuan khusus.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa model matrik penyajian data sesuai dengan kebutuhan :

1. Matrik konteks peristiwa

Matrik ini berupa gambaran peristiwa atau kejadian yang ada dalam hal strategi PKS Kota Padang menghadapi pemilu legislatif 2004.

2. Matrik daftar cek

Merupakan matrik untuk memantau komponen atau dimensi penelitian. Isi matrik berupa tanda-tanda untuk mengetahui apakah data terkait dengan strategi serta peluang dan tantangan PKS Kota Padang dalam memenangkan pemilu.

3. Matrik waktu

Matrik yang berisi dseskripsi perkembangan antar waktu tentang kondisi yang terjadi pada waktu itu.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

Pada bagian ini akan dipaparkan hal-hal yang berhubungan dengan gambaran umum tentang Kota Padang. Beberapa diantaranya adalah kondisi fisik, kondisi sosial, budaya dan ekonomi penduduk serta konfigurasi politik Kota Padang.

a. Kondisi Fisik

Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat dikenal sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan urat nadi perdagangan serta jalur utama bagi masyarakat Minangkabau untuk pergi berdagang dan merantau ke negeri lain. Kota Padang terletak pada 0° 54' sampai 1° 08' LS dan 100° 17' – 100° 34' BT dengan luas daerah seluruhnya adalah 694,96 km^2. Dari luas daerah ini sekitar 180 km^2 merupakan daerah yang efektif sedangkan 434,63 km^2 merupakan daerah perbukitan.

Kota Padang berbatasan dengan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Solok, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman serta sebuah samudera yaitu Samudera Indonesia. Selain memiliki pantai yang indah sepanjang 84 km, kota Padang juga mempunyai pulau sebanyak 17 buah dan di tengah kota mengalir lima sungai besar dan 16 sungai kecil.

Sesuai dengan kondisi geografisnya ini pada siang hari iklim berada pada keadaan 23^0 C – 32^0 C dan pada malam hari 22^0 C – 28^0 C. Curah hujan dan jumlah hari hujan relatif sedang yaitu rata-rata per-bulan 304,9 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 16,16 hari per-bulan. Suhu udara maksimum mencapai $31,6^0$ C dan

minimum 22,0^0 C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 75% - 84%. Jika dilihat dari sudut penggunaan tanah maka 7,09% tanah di Kota Padang digunakan untuk perumahan, untuk perdagangan 0,25% dan untuk industri 0,24% serta 28,64% untuk areal pertanian, sedangkan sisanya 55,04% masih merupakan hutan/semak belukar.

Transportasi dalam kota Padang ataupun dengan kota-kota di sekitarnya dapat dikatakan lancar. Dengan kondisi ini kota Padang merupakan kota terbuka bagi banyak pendatang, baik dalam wilayah Minangkabau sendiri maupun dari luar wilayah Minangkabau.

b. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Penduduk

Penduduk yang mendiami wilayah Kota Padang bila dirunut ke belakang, sebagian berasal dari daerah pedalaman Minangkabau. Menurut sejarahnya, asal muasal masyarakat Minangkabau adalah yang mendiami kawasan pusat *(heartland)* yang dikenal dengan daerah luhak. Menurut Mestika Zed (1986: 26) luhak adalah kawasan pusat *(heartland)* alam Minangkabau yang merupakan daerah tempat tinggal di mana masyarakat Minangkabau berkembang pada awalnya. Kawasannya terletak di pedalaman Minangkabau yang disebut *darek* (darat). Sebagai kawasan inti alam Minangkabau, luhak berada di dataran tinggi selingkar Bukit Barisan (Kato, 1989: 2). Daerah luhak di dalam kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau terdiri dari tiga luhak, yaitu daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak 50 Kota. Masyarakat yang berasal dari kawasan inti ini merantau dan akhirnya menetap di Kota Padang sehingga kota Padang dikenal sebagai daerah *rantau.* Bila dijelaskan lebih lanjut, penduduk Padang adalah campuran dari orang-orang Minangkabau yang turun dari Solok, melintasi Bukit Barisan ke arah Barat, turun ke daerah Padang luar kota dan mendirikan negeri yang bernama Koto Tangah, Nanggalo dan Pauh.

291/K/2005-S. (1)

324.204072
NUR.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Rombongan ini masuk ke Padang dan bertemu dengan penduduk yang turun dari Padang Panjang melalui daerah Kayu Tanam (Amir B., 1989 : 8).

Sebagai daerah *rantau* bagi masyarakat Minangkabau di pedalaman dan juga sebagai ibukota propinsi, Kota Padang sangat terbuka bagi berbagai pengaruh yang datang dari luar. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Padang hidup berdampingan dengan teguh berpegang pada adat istiadat Minangkabau pada umumnya.

Adat istiadat yang merupakan bentuk keseluruhan dari sistem struktural masyarakat dimaksudkan untuk membentuk aturan-aturan yang bernilai dan menjadi dasar serta pedoman dari semua keputusan yang legal dan etik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa adat mempersembahkan kembali bentuk-bentuk tingkah laku yang ideal bagi masyarakat. Seperangkat nilai adalah seperangkat konsepsi baik secara eksplisit atau implisit yang menjadi milik khusus dari ciri khusus suatu kesatuan sosial masyarakat menyangkut pada suatu yang diingini bersama (karena berharga) dan mempengaruhi pemilihan sebagai cara, alat dan tujuan sebuah tindakan (Kluckhonhn & Parsons, 1951: 395). Selanjutnya sistem nilai itu mengandung pokok-pokok pandangan orang Minangkabau terhadap hakekat hidup, hakekat kerja, hakekat waktu, hakekat alam dan pandangan terhadap hubungan antar individu dan antar kelompok (sesama) dalam masyarakat.

Kehidupan sosial penduduk di Kota Padang sebagaimana wilayah Minangkabau lainnya ditata berdasarkan prinsip-prinsip sistem *matrilinial* yang merupakan satu-satunya etnik penganut sistem matrilinial di Indonesia. Menurut Kato (1989: 30) sistem matrilinial mempunyai empat ciri yang menonjol yaitu: Pertama, keturunan dan pembentukan kumpulan keturunan berpusat di sekitar garis keturunan ibu. Kedua, kumpulan-kumpulan keturunan matrilinial yang bersatu memiliki harta secara adat dan memiliki harta secara bersama. Ketiga, pola tempat tinggal bersifat dwilokal, artinya seorang suami yang sudah menjadi bagian dari

keluarga istrinya, tetap menjadi anggota keluarga ibunya. Keempat, kekuasaan dan kewibawaan dalam sebuah keluarga dan suku terletak di tangan *mamak* (saudara laki-laki dari ibu), bukan di tangan ayah. Prinsip-prinsip sistem matrilinial tersebut menjadi basis dan mempengaruhi seluruh bagian dalam kehidupan masyarakat, baik itu di bidang budaya, ekonomi ataupun politik. Disamping prinsip-prinsip matrilinial yang menunjukkan *kungkungan* adat sangat kental mewarnai pola tingkah laku masyarakat, maka agama Islam juga terlihat kuat mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Dalam kaitan ini terdapat ungkapan yang terus dipakai yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.* Artinya adat dan agama di Minangkabau saling sejalan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satu implikasi dari sejalannya adat dan agama adalah ditemuinya konsep kepemimpinan *tigo tungku sajarangan* (tiga serangkai dalam kepemimpinan) yaitu kepemimpinan ninik mamak, kepemimpinan alim ulama dan kepemimpinan cerdik pandai (Sihombing, 1980 : 5).

Kepemimpinan ninik mamak merupakan kepemimpinan tradisional dan adanya sesuai dengan pola yang telah digariskan oleh adat. Adat mengatakan bahwa ninik mamak itu ibarat *kayu gadang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda* (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Maksud dari ungkapan ini adalah ninik mamak itu pemimpin dalam kaumnya. Segala sesuatu keputusan yang diambil berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat. Kepemimpinan alim ulama dapat diperoleh siapa saja tanpa memperhatikan asal usul dan keturunan. Sebagai seorang pemimpin agama, posisi alim ulama sangat dihormati oleh masyarakat Minangkabau. Kepemimpinan cerdik pandai sebagaimana halnya kepemimpinan alim ulama dapat dijabat siapa saja dan berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan tempat bertanya bagi masyarakat. Ketiga konsep kepemimpinan ini secara riil dapat ditemui pada diri seseorang. Oleh sebab itu sangat sulit membedakan secara tegas stratifikasi ketiga corak kepemimpinan tersebut.

Selain itu asas demokrasi dalam adat Minangkabau menempatkan individu pada kedudukan yang fungsional dalam masyarakat. Penghargaan yang diberikan kepada setiap individu inilah sebenarnya inti demokrasi dalam adat Minangkabau (Sairin, 1996 : 152).

Berdasarkan data monografi Kota Padang diketahui jumlah penduduk pada tahun 2003 berjumlah 765.450 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 380.040 jiwa dan perempuan sebanyak 385.410 jiwa. Gambaran tentang penduduk Kota Padang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Padang Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2003

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	39.319	36.578	75.897
2.	5 – 9	39.176	36.442	75.618
3.	10 – 14	35.454	33.649	69.103
4.	15 – 19	42.938	45.708	88.646
5.	20 – 24	47.847	52.698	100.545
6.	25 – 29	34.348	34.486	68.834
7.	30 – 34	29.881	30.433	60.314
8.	35 – 39	25.792	26.866	52.658
9.	40 – 44	23.500	23.406	46.906
10.	45 – 49	20.358	19.297	39.655
11.	50 – 54	14.508	13.091	27.599
12.	55 – 59	7.947	8.288	16.175
13.	60 – 64	7.511	8.040	15.551
14.	65 – 69	4.672	6.161	10.833
15.	70 – 74	3.497	4.974	8.471
16.	75 -	3.292	5.353	8.645
	Jumlah	380.040	385.410	765.450

Sumber : BPS Kota Padang

Berdasarkan status kewarganegaraan, mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah Kota Padang adalah WNI (Warga Negara Indonesia) dengan jumlah 765.366 jiwa, dan penduduk dengan status WNA (Warga Negara Asing) berjumlah 84 jiwa. Dibandingkan dengan tahun 2002 jumlah penduduk WNA yang tinggal di kota Padang terjadi angka penurunan yang cukup drarstis di mana periode tahun 2002 berjumlah 631 jiwa. Gambaran tentang jumlah penduduk Kota Padang tahun 2003 berdasarkan status kewarganegaraannya terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kota Padang menurut
Kewarganegaraan dan Kecamatan Tahun 2003

No.	Kecamatan	WNI	WNA	Jumlah
1.	Bungus Tel.Kabung	22.164	-	22.164
2.	Lubuk Kilangan	38.728	6	38.734
3.	Lubuk Begalung	93.202	1	93.203
4.	Padang Selatan	57.338	4	57.342
5	Padang Timur	79.390	23	79.413
6.	Padang Barat	56.958	22	56.980
7.	Padang Utara	69.460	19	69.479
8.	Nanggalo	53.171	-	53.171
9.	Kuranji	105.369	1	105.370
10.	Pauh	47.955	1	47.956
11	Koto Tangah	141.631	7	141.638
	Padang 2003	756.366	84	765.460
	2002	733.790	613	734.421

Sumber : BPS Kota Padang, 2003.

Berdasarkan data pada tabel 2 jumlah penduduk kota Padang dengan status WNI pada tahun 2002 berjumlah 733.790 orang dan tahun 2003 berjumlah 756.366 orang. Sementara jumlah kota Padang berstatus WNA berjumlah 613 orang dan tahun 2003 terjadi penurunan menjadi 84 orang.

Mengenai kondisi perekonomian di kota Padang nampaknya sudah maju dengan karekteristik yang bercorak masyarakat tradisional dan industri. Sektor-sektor yang nampak dominan menampung tenaga kerja yang ada adalah usaha di bidang industri pertanian, perdagangan, rumah makan dan perhotelan serta super market. Secara umum dapat dikatakan rata-rata perekonomian penduduk cukup berkembang apalagi ditambah dengan usaha pemerintah daerah mencari terobosan-terobosan dan pengembangan-pengembangan bidang tertentu seperti TRB (Terminal Ranah Bingkuang), pembangunan Pasar Modern di bekas terminal Goan Hoat dan begitu juga dengan akan digunakannya Bandar Udara Minangkabau International Air Port. Meskipun bandar udara itu berada di Ketaping yang termasuk wilayah kabupaten Padang Pariaman, namun secara ekonomi hal tersebut akan memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat kota Padang.

c. Konfigurasi Politik Kota Padang

Membicarakan karakteristik politik Kota Padang yang menjadi setting penelitian ini, tidak terlepas dari pembahasan budaya politik yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa adat istiadat yang ada sangat mempengaruhi seluruh basis kehidupan masyarakat baik itu di bidang sosial budaya, ekonomi maupun kehidupan politik.

Sifat egaliter dan budaya demokratis merupakan "kata kunci" untuk memahami budaya politik yang hidup di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Demikian juga dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin terjalin dalam suasana demokratis dimana segala permasalahan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Hal ini telah berlangsung lama sejak Minangkabau tradisional (Manan, 1995).

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, kota Padang yang sebelumnya memiliki 11 kecamatan dan 193 kelurahan kini memiliki 11 kecamatan dengan 103 kelurahan. Kecamatan yang jumlah kelurahannya mengalami penurunan terbanyak adalah kecamatan Padang Barat yaitu dari 30 kelurahan menjadi 10 kelurahan.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2004, peta perpolitikan di kota Padang mengalami perubahan dibandingkan hasil pemilu 1999. Pada tahun 1999 peraih suara terbanyak adalah Partai Amanat Nasional sebesar 34,28% diikuti oleh Partai Golongan Karya, PPP dan PDI Perjuangan. Sedangkan pada pemilu 2004 peraih suara terbanyak jatuh pada PKS diikuti oleh PAN, Golkar, PPP dan Partai Demokrat. Gambaran tentang urutan partai politik (parpol) pemenang Pemilu tahun 2004 terlihat pada tabel 3.

Tabel 3
Urutan Partai Politik
Pemenang Pemilu 2004 di Kota Padang

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi	%
1.	Partai Keadilan Sejahtera	11	24,44
2.	Partai Amanat Nasional	9	20,00
3.	Partai Golongan Karya	8	17,78
4.	Partai Persatuan Pembangunan	5	11.11
5	Partai Demokrat	5	11,11
6.	Partai Bulan Bintang	3	6,67
7.	Partai KeadilanPersatuan Indonesia	2	4,44
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	4,44
	J u m l a h	45	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang.

Berdasarkan data tabel 3 memperlihatkan PKS memperoleh 11 kursi (24,44%), PAN 9 kursi (20,%), Partai Golkar 8 kursi (17,70%), PPP 5 kursi (11,11%), Partai Demokrat 5 kursi (11,11%), PBB 3 kursi (6,67%), PKPI 2 kursi (4,44%), dan PDIP 2 kursi (4,44%).

Dari 45 orang jumlah anggota DPRD kota Padang hasil pemilu 2004 mayoritas diduduki oleh laki-laki, yakni berjumlah 40 orang, dan selebihnya diduduki oleh perempuan, yakni 5 orang. Kelima orang perempuan anggota DPRD Kota Padang tersebut adalah Nurna Eva Karmila, Rahayu Purwanti, S.P. dan Siti Zakiah, S.P dari PKS serta Ernie, ZN dan Dra. Yasnida Syamsuddin masing-masing dari Partai Golkar dan PBB. Gambaran tentang pengelompokan anggota dewan ke dalam fraksi-fraksi terlihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang Hasil Pemilu 2004

No.	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	%
1.	Fraksi PKS	11	24,44
2.	Fraksi Golkar	10	22,22
3.	Fraksi PAN	9	20,00
4.	Fraksi PPP	5	11,11
5.	Fraksi Demokrat	5	11,11
6.	Fraksi BPI	5	11,11
	J u m l a h	45	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Padang.

Berdasarkan data pada tabel 4 jumlah anggota DPRD kota Padang dalam Fraksi PKS berjumlah 11 orang (24,44%), Fraksi Golkar berjumlah 10 orang (22,22%), Fraksi PAN berjumlah 9 orang (20%), dan dari Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi BPI masing-masing berjumlah 5 orang (11,11%).

Sementara itu dari dari 6 fraksi yang ada di DPRD kota Padang dibagi ke dalam 4 komisi, masing-masing Komisi A sebanyak 11 anggota, Komisi B sebanyak 10 anggota, Komisi C sebanyak 11 anggota, dan Komisi D sebanyak 10 anggota. Sementara itu dari aspek kepemimpinan, DPRD Kota Padang diketuai oleh Hadison, S.Si, Apt. dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), wakil ketua masing-masing Z. Pandji Alam dari Partai Golkar dan H. Masdi Ardi dari Partai Amanat Nasional (PAN). (Sekretariat DPRD Kota Padang).

Anggota DPRD Kota Padang pada waktu pencalonan tersebar ke dalam 5 daerah pemilihan. Gambaran tentang jumlah anggota DPRD Kota Padang berdasarkan daerah pemilihan terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi
Anggota DPRD Kota Padang dalam Pemilu Tahun 2004

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
	Kota Padang I :		
1.	Padang Timur	78.464	
2.	Padang Barat	56.465	12
3.	Padang Utara	68.982	
	Kota Padang II:		
4.	Pauh	47.991	11
5.	Koto Tangah	142.599	
	Kota Padang III:		
6.	Nanggalo	52.115	9
7.	Kuranji	106.104	
	Kota Padang IV:		
8.	Lubuk Begalung	93.445	9
9.	Padang Selatan	56.143	
	Kota Padang V:		
10.	Bungus Tl. Kabung	22.164	4
11.	Lubuk Kilangan	38.869	
	Jumlah Total	764.341	45

Sumber : KPUD Kota Padang

Berdasarkan data pada tabel 5 diketahui bahwa anggota DPRD Kota Padang berdasarkan daerah pemilihan adalah daerah pemilihan Padang I berjumlah 12 orang, Padang II berjumlah 11 orang, Padang III berjumlah 9 orang, Padang IV berjumlah 9 orang, dan Padang V berjumlah 4 orang.

Tabel 6
Penyebaran Pemilih dalam Pemilu 2004
di 11 Kecamatan di Kota Padang

No.	Kecamatan	Pemilih Terdaftar		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Padang Barat	17.848	28.612	46.480
2.	Padang Timur	21.083	32.811	53.894
3.	Padang Selatan	16.932	27.092	44.024
4.	Padang Utara	17.873	18.988	36.861
5.	Lubuk Begalung	22.038	32.911	54.949
6.	Lubuk Kilangan	10.156	11.401	21.557
7.	Nanggalo	13.405	15.337	28.742
8.	Kuranji	25.412	37.273	62.685
9.	Pauh	11.598	11.601	23.559
10.	Koto Tangah	29.482	42.636	72.118
11.	Bungus Teluk Kabung	8.466	6.713	15.179
Jumlah		**194.653**	**265.395**	**460.048**

Sumber : KPUD Kota Padang

Sementara itu ditataran eksekutif, Kota Padang dipimpin oleh Walikota Drs.H. Fauzi Bahar, M.Si dan Wakil Walikota H. Yusman Kasim, SE. Untuk tingkatan eselon di pemerintahan terdiri dari 29 orang eselon II, 148 jabatan untuk eselon III dan 1082 orang pejabat eselon IV (BPS Kota Padang).

2. Temuan Khusus

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi : *Pertama*, sekilas tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh PKS dalam memenangkan pemilu legislatif 2004. *Ketiga*, peluang dan tantangan yang dihadapi PKS dalam menghadapi pemilu 2009 di Kota Padang.

a. Sekilas Tentang Partai Keadilan Sejahtera

PKS adalah kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan di Mesjid Al Azhar dihadapan sekitar 50 ribu pendukungnya pada tanggal 9 Agustus 1998. Partai ini didirikan sejumlah aktifis muslim Indonesia yang kebanyakan berasal dari kalangan intelektual kampus terutama para aktifis dan mantan aktifis mahasiswa (Damanik, 2002).

PKS merupakan hasil penggabungan dua partai yaitu antara PK dengan PKS. Penggabungan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Majelis Syuro PK pada tanggal 17 April 2003 dan Majelis Syuro PKS pada tanggal 18 April 2003. Penggabungan kedua partai ini disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M-02. UM. 06.08 tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003.

Penggabungan kedua partai ini dilakukan mengingat kedua partai sama-sama tidak mencapai *electoral threshold* sebesar 2% dalam pemilu 1999 yang berimplikasi pada tidak dapatnya partai tersebut mengikuti pemilu lima tahun berikutnya. Hal ini sebagaimana diatur oleh ketentuan UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu.

Fenomena PK lebih beruntung bila dibandingkan dengan PKS. PK mendapat suara sebanyak 1.436.565 atau sekitar 1,36% pada pemilu 1999 dan urutan ke tujuh secara nasional setelah PDI-P, Golkar, PPP, PAN, PKB, dan PBB. Sementara di Kota Padang menduduki peringkat ke enam dengan perolehan suara 13.678 suara yang setara dengan 1 (satu) kursi legislatif di bawah PAN, Golkar, PPP, PDI-P, dan PBB.

Untuk menghadapi pemilu legislatif 2004, maka PK menggabungkan diri dengan PKS. Pada pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, PKS dengan sangat mengejutkan mampu memperoleh suara yang menggembirakan, bahkan di beberapa daerah pemilihan, PKS mampu menempati urutan teratas terutama pada daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, Bandung (Jawa Barat) dan Padang (Sumatera Barat). Jika dilihat secara nasional PKS menduduki urutan ke enam di bawah Golkar,

PDI-P, PKB, PPP dan Partai Demokrat. Sedangkan khusus di Kota Padang, PKS menempati urutan teratas disusul oleh Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB dan PDI-P.

PKS berasaskan Islam dan menamakan dirinya sebagai partai dakwah dan partai kader. Sebagai sebuah partai dengan asas Islam maka nilai-nilai Islam menjadi spirit dan landasan nilai partai. Lebih lanjut dapat ditemui dalam tujuh karakteristik partai ini, yaitu : *Pertama,* moralis. PKS berupaya menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam sebagai basis keteladanan serta tonggak dalam program dan aktifitas yang digulirkan. *Kedua,* profesional. Dengan berlandaskan moral, profesionalitas akan berkembang secara positif dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. *Ketiga,* patriotik. PKS menyadari bahwa kehidupan melalui perjuangan dalam partai apa pun hasilnya senantiasa disyukuri, dan kader-kader partai akan terus berjuang dan tidak berarti putus asa bila belum berhasil dalam perjuangan. *Keempat,* moderat. Sikap moderat adalah refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah yang menjadi ciri umat Islam, umat yang jauh dari sikap berlebih-lebihan dan pengabaian. *Kelima,* demokrat yang pada intinya adalah substansi demokrasi. *Keenam,* reformis. PKS akan menempatkan posisinya sebagai partai reformis serta konsisten menjauhi segala karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan (anarkhis). *Ketujuh,* independen. PKS yang telah menyatakan jati diri partai dakwah akan berupaya untuk selalu pada posisi independensi dalam pengertiannya yang benar.

Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa, maka partai ini mempunyai tujuan melalui usaha sebagai berikut : *Pertama,* membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman. *Kedua,* membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami. *Ketiga,* mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problematik dan tuntutan masa depan. *Keempat,* membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan

bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Kelima,* membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa (AD/ART PKS, 2003).

Partai yang memiliki moto *"membela umat, menyelamatkan bangsa"* ini memiliki visi sebagai partai dakwah penegak syariah Islam dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Sementara itu misinya terangkum dalam hal-hal berikut : *Pertama,* menyebarkan dakwah dan mencetak kader sehingga unsur perubahan *(anashir taqhyir). Kedua,* mengembangkan institusi dan membentuk pusat perubahan *(markaz taqhyir). Ketiga,* membangun opini dan menerapkan nilai-nilai Islam. *Keempat,* menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar. Kelima,* penyadaran politik dan pembelaan masyarakat. *Keenam,* komunikasi untuk persaudaraan dan kesatuan umat (DPP PKS).

Dalam waktu yang tidak begitu lama partai ini telah berhasil memiliki masing-masing perwakilan DPW Tingkat Provinsi dan DPD Tingkat Kabupaten/Kota serta DPC dan DPRa untuk perwakilan masing-masing di Kecamatan dan ranting. Khusus Kota Padang, setelah DPW Sumbar terbentuk 23 Juli 1998 dan dideklarasikan tanggal 8 Agustus 1998 maka DPD Kota Padang secara resmi didirikan tanggal 8 Agustus 1998. DPD Kota Padang memiliki 11 DPC dan 60-an DPRa. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Jumlah DPC dan DPRa di Lingkungan DPD PKS Kota Padang

No.	Kecamatan	Jumlah	
		DPC	DPRa
1.	Nanggalo	1	6
2.	Padang Timur	1	7
3.	Padang Barat	1	6
4.	Koto Tangah	1	9
5.	Padang Selatan	1	7
6.	Padang Utara	1	8
7.	Kuranji	1	7
8.	Pauh	1	6
9.	Lubuk Kilangan	1	8
10.	Lubuk Begalung	1	6
11.	Bungus Teluk Kabung	1	8
Jumlah Total		11	78

Data diolah dari Arsip DPD PKS Kota Padang, 2005.

DPD PKS Kota Padang yang beralamat di Jalan Jati II No.15 Padang, disamping sebagai tempat terkonsentrasinya aktifitas-aktifitas PKS di Kota Padang, sekaligus sebagai tempat koordinasi masing-masing wilayah dakwah DPD PKS Kota Padang yang melingkupi 11 DPC di masing-masing kecamatan yang dibagi dalam tiga wilayah dakwah yaitu : (1) Wilayah dakwah I meliputi Kecamatan Padang Utara, Koto Tangah, Padang Barat dan Nanggalo ; (2) Wilayah dakwah II meliputi Kecamatan Padang Timur, Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan ; dan (3) Wilayah dakwah III meliputi Kecamatan Padang Selatan, Lubuk Begalung, dan Bungus Teluk Kabung.

Pengurus DPD PKS Kota Padang semuanya diangkat oleh DPW PKS Sumbar setiap lima tahun sekali dengan cara musyawarah (Dewan Syuro). Namun dalam pertanggungjawaban pengurus harus memberikan laporan tahunan kepada DPW PKS setiap akhir Februari sesuai dengan program tahunan DPD PKS. Ada pun pengurus DPD Kota Padang terdiri dari 7 orang pengurus inti, 3 orang ketua wailayah dakwah, 24 orang pengurus yang membidangi 5 bidang berikut yaitu : (1) bidang kaderisasi ; (2) bidang kewanitaan ; (3) bidang kepemudaan ; (4) bidang kepanduan ; dan (5) bidang kebijakan publik (DPD PKS Kota Padang, 2005). Secara lengkap kepengurusan DPD PKS Kota Padang adalah sebagai berikut :

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang

Ketua (Plt.)	:	Mochlasin, S.Si.
Wakil Ketua	:	Drs. Khairul Ikhwan
Sekretaris	:	M. Ihsan, S.Tp.
Wakil Sekretaris	:	Arnedi Yarmen, S.Pd.
Bendahara	:	Rinto Ernandi
Wakil Bendahara	:	Aljufri, S.Pd.
Ketua Wilayah Dakwah I	:	Amor F. Muhammad, SE.
Ketua Wilayah Dakwah II	:	Budiman, S.Ag.
Ketua Wilayah Dakwah III	:	M. Ihsan, S.Tp.
Bidang Kaderisasi		Arwim Al Ibrahimi, Lc. M. Marzuki, S.Si. Djunaidi Hendry, ST. Abdurrahman, A.Md. Dra. Daslinur Nuria Safitri
Bidang Kewanitaan	:	Dewi Novita, S.Tp. Yuliza, S.Sos. Nizma Hurriah, S.Ag. Rita Susanti, S.Ag. Ivo M.K, SIQ, S.Pd.I. Rina Haryati
Bidang Kepemudaan	:	Paljariati, S.Ag. M. Boy Hadi Kurniawan, S.Tp. Muharlion, S.Pd. Novrizon, S.Sos.
Bidang Kepanduan	:	Mayefredi, S.Ag. Jhon Bahrian, S. Si. Wahyu Darsa Ahda Kurniawan
Bidang Kebijakan Publik	:	Drs. Khairul Ikhwan Andra Febi, ST. Indra, SH. Idrial Idrus, ST.

(Sumber : DPD PKS Kota Padang, 2005).

b. Strategi PKS dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi-orientasi yang sama dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan George B.de Huszar dan Thomas H. Stevenson, bahwa partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan (Surbakti, 1992).

Untuk melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan publik, suatu partai politik harus terlebih dahulu menetapkan strategi partai yang membedakannya dengan partai lainnya. Perbedaan strategi sesuai dengan ideologi dan *platform* masing-masing partai politik. Namun pada hakekatnya berkisar pada pemilih, pesaing dan organisasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan PKS dalam memenangkan pemilu legislatif 2004 di Kota Padang, khususnya strategi segmentasi, *targetting* dan *positioning* (penentuan posisi).

1) Strategi Segmentasi

Segmentasi yaitu suatu kelompok yang memberikan tanggapan yang sama. Segmentasi dibedakan berdasarkan segmentasi geografik dimana partai politik hanya melihat pemilih/massa berdasarkan suku, ras, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Kemudian segmentasi demografik yang didasarkan pada jenis kelamin, umur, agama, suku, profesi, pendidikan, dan sebagainya.

Strategi segmentasi yang dilakukan PKS adalah dengan memilih kelompok masyarakat yang menjadi pendukung PKS dalam pemilu 2004. Ada pun segmen

yang menjadi sasaran perolehan suara bagi PKS dibagi ke dalam segmen geografik dan segmen demografik berikut ini :

1) Kelompok masyarakat perkotaan yaitu masyarakat yang modern, masyarakat yang berpendidikan.
2) Kelompok masyarakat pesisir pantai yaitu masyarakat yang mata pencahariannya nelayan.
3) Kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pertanian yaitu masyarakat yang mata pencahariannya bertani.
4) Kalangan muda terdidik yang mempunyai inisiatif dan ikut andil dalam memperjuangkan reformasi.
5) Kaum perempuan dimana pada segmentasi ini dirasakan paling penting karena jumlah pemilih perempuan lebih besar daripada laki-laki.

Melalui kelompok-kelompok masyarakat ini lah PKS berusaha merebut simpati agar mendapat dukungan pada pemilu legislatif 2004. Menurut Sekretaris DPD PKS Kota Padang yang sekarang juga menjabat anggota legislatif (DPRD) Kota Padang,

> *"PKS berupaya meraup suara dari berbagai kalangan masyarakat. Segmen masyarakat ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam perolehan suara pemilu legislatif 2004. Ternyata strategi segmentasi ini bisa mendongkrak suara PKS sehingga menjadi partai pemenang pemilu legislatif 2004 sebagaimana disinyalir oleh majalah Kompas."*

Dalam merebut simpati massa, PKS telah melakukan beragam upaya pendidikan politik rakyat. Sosialisasi visi, misi, dan *platform* partai adalah langkah awal yang merupakan faktor penentu keberhasilan sosialisasi terhadap pemilih dalam pemilu.

Salah satu fungsi dan tugas partai politik adalah melakukan sosialisasi politik pada masyarakat. Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada (Budiardjo, 1983). Doktrin-doktrin politik partai

biasanya diusahakan untuk diterapkan dalam masyarakat. Berhasil atau tidaknya suatu partai biasanya juga diukur oleh berhasil atau tidaknya partai-partai tersebut menerapkan dan menanamkan doktrin-doktrinnya pada masyarakat. Cara pemasyarakatan doktrin politik partai yang baik ialah dengan cara persuasif (ajakan dan dorongan) bukan dengan kekerasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukarna (1976) bahwa "pemasyarakatan doktrin politik dengan kekerasan, tidak akan memperoleh simpati masyarakat, bahkan masyarakat akan menentangnya."

Suatu doktrin politik yang mudah dimasyarakatkan ialah doktrin yang bahan-bahannya berasal dari rakyat dan sesuai dengan kemauan rakyat. Suatu doktrin yang bersifat asing, kurang dihayati oleh rakyat, bahkan bertentangan dengan kemauan rakyat, maka doktrin politik yang demikian tidak akan berkembang.

Bagi PKS sendiri sesuai dengan asas partai yaitu Islam maka nilai-nilai Islami yang disebarkan ke tengah-tengah masyarakat Kota Padang seakan-akan menemukan tempat yang cocok karena masyarakat Kota Padang adalah masyarakat Minang yang hidup bersandikan pada adat dan agama, sebagaimana falsafahnya *"adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah."* Adat dan agama berjalan seiring dan bahwa di dalam masyarakat sangat malu bila dikatakan seseorang tidak beradat atau tidak beragama (Hamka, 1985).

Iklim masyarakat Minangkabau yang menganut falsafah bersumber dari ajaran Islam ternyata cocok untuk basis perjuangan, terutama gerakan atau partai dengan basis atau berasaskan Islam. Masyumi, Perti, dan PSII serta sebagian besar partai Islam telah terbukti pernah berkembang di Sumbar. Menurut Deliar Noer (1985), partai politik Islam lebih dominan di daerah-daerah terutama daerah dengan penduduk beragama Islam taat, termasuk diantaranya Sumbar, karena adanya kata Islam itu sendiri yang menjadi penyatu gerakan mereka.

Disamping sesuai dengan kultur masyarakat Kota Padang yang egaliter, masyarakat terlihat lebih banyak pula bersedia menerima perubahan di era reformasi yang notabene diusung oleh PKS.

Dalam melakukan sosialisasi PKS menggunakan dua cara. *Pertama*, sosialisasi ke dalam yaitu untuk anggotanya sendiri. Sosialisasi seperti ini disebut sebagai pengkaderan terhadap anggotanya. *Kedua*, sosialisasi ke luar, yaitu dengan memperkenalkan PKS kepada masyarakat melalui ideologi dan *platform* partai.

Sosialisasi ke dalam dilakukan terhadap anggota PKS yang menurut ART partai terdiri dari :

1) Anggota kader pendukung yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.
2) Anggota kader inti yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksian.
3) Anggota kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Berkaitan dengan keanggotaan partai, PKS sebagaimana tercantum dalam AD/ART-nya menyatakan bahwa setiap WNI bisa menjadi anggota partai dan tidak ditentukan oleh ketentuan-ketentuan umur, suku mau pun agama.

Proses pengkaderan dilakukan dengan menggunakan pengkaderan dakwah. Proses pengkaderan ini menggunakan sistem sel dimana setiap kader yang telah dibina mempunyai binaan dan binaan juga mempunyai binaan di bawahnya. Pola yang berlangsung antara yang membina dengan binaan adalah pola *patron-client* artinya seorang anggota baru tidak serta merta mengetahui siapa gerangan pemimpin mereka yang sebenarnya. Ia hanya kenal orang-orang yang merekrutnya tadi. Baru setelah keanggotaan mereka cukup lama dan dirasakan telah memiliki nilai-nilai dan sikap yang selaras dengan ajaran Islam, anggota baru itu tahu lebih banyak tentang organisasi tersebut.

Pengkaderan yang dilakukan oleh PKS Kota Padang terbagi atas beberapa pelatihan yaitu : (1) orientasi partai dan tokoh (OPT) ; (2) taklim rutin partai yang dilakukan sekali sebulan ; (3) training orientasi partai ; (4) taklim rutin kader yang dilakukan sekali seminggu. Disamping pelatihan rutin ini juga dilakukan pelatihan-pelatihan spesifik untuk keperluan sesuatu hal seperti pelatihan saksi dalam pemilu.

Menurut Rinto Ernadi, *"pelatihan kader seperti kegiatan orientasi partai dan tokoh (OPT) dijadikan sebagi jalan atau pintu gerbang untuk mendalami lebih jauh tentang Islam dan PKS itu sendiri."*

Melalui proses pengkaderan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kader yang memiliki karakter, mental, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilandasi oleh iman dan taqwa yang diwujudkan dalam perilaku dengan dasar moralitas agama. Secara spesifik pengkaderan PKS bertujuan untuk : (1) memberikan pemahaman Islam kepada anggotanya ; (2) meningkatkan kualitas jati diri, intelektualitas, profesionalisme, kesungguhan, kemampuan antisipasi ke masa depan dan kepekaan sosial serta kepemimpinan yang berwibawa ; (3) memperkokoh komitmen PKS terhadap negara, wawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa ; (4) mempertebal mental kejuangan dan mewujudkan reformasi total menuju masyarakat Indonesia baru ; (5) meningkatkan semangat berkorban, rasa tanggungjawab dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan ; dan (6) membangun kader secara berkesinambungan.

Melalui pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan kader yang telah terbentuk dan berasal dari beragam segmentasi dapat memperjuangkan partai merebut perolehan suara dalam pemilu legislatif 2004.

Sementara itu, sosialisasi ke luar difokuskan pada memperkenalkan visi, misi dan *platform* partai kepada masyarakat luas. Sosialisasi umumnya dilakukan melalui dakwah di mesjid-mesjid, kegiatan-kegiatan sosial, mau pun forum-forum kepedulian lainnya.

Sosialisasi kepada masyarakat terutama untuk merebut simpati pemilih difokuskan kepada ranting-ranting yang ada di setiap kelurahan dan bermuara kepada kecamatan. Isu-isu yang ada di setiap kecamatan dikelola oleh partai dan dijadikan sarana bagi upaya memenangkan pemilu, sehingga tidak heran kegiatan di satu kecamatan akan berbeda dengan kecamatan lainnya. Misalnya di satu kecamatan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya maka dilakukan perbaikan sarana-sarana ibadah, sementara yang lainnya dilakukan kegiatan-kegiatan sunatan massal, pencerahan politik atau hal-hal lain yang dirasa perlu bagi masyarakat di wilayah itu.

Untuk segmentasi masyarakat yang berada di pesisir pantai dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pemberian bantuan peralatan masyarakat nelayan berupa peralatan sederhana seperti pukat dan yang lainnya. Kemudian untuk masyarakat di wilayah pertanian diberikan bantuan tentang berbagai pemecahan masalah di seputar tanah, tanaman, atau strategi pemasarannya.

Sementara untuk merebut simpati kaum muda terdidik sering dilakukan diskusi-diskusi strategis dalam memecahkan masalah-masalah bangsa sampai pada pembinaan di bidang pemuda dan olah raga. Sedangkan untuk segmentasi kaum perempuan dilakukan program-program yang menyentuh langsung hak-hak perempuan seperti pendidikan politik perempuan, perjuangan perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan publik dan seterusnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasinya PKS mempunyai berbagai alternatif sebagaimana dituturkan oleh Arnedi Yarmen berikut ini.

> *"Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya : (1) pemasaran door to door (direct selling) yaitu sebuah kegiatan dimana PKS menawarkan programnya dari pintu ke pintu melalui penyebaran pamflet dan atribut partai lainnya ; (2) menawarkan program nyata kepada masyarakat melalui kader yang siap membantu memecahkan kesulitan-kesulitan yang ada di tengah masyarakat ; dan (3) menyusun program-program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan jangka panjang masyarakat."*

2) Strategi Targetting

Targetting maksudnya adalah upaya pemilihan suatu segmen tertentu yang ingin dicapai dan digarap secara intensif untuk diraih sebagai pendukung utamanya. Sebagai partai Islam yang kelahirannya dipelopori oleh kalangan muda terdidik baik yang berada di dalam kampus mau pun yang berada di luar kampus membuat PKS memilih target utamanya (pendukung) adalah kalangan muda Islam, cendekiawan santun dan profesional, baik yang bergabung dalam organisasi Islam atau pun yang independen berada di tengah-tengah masyarakat.

Untuk melaksanakan strategi targetting ini PKS memulai dengan mengajak orang-orang untuk ikut dalam kegiatan politik sebagai anggota dengan cara melalui kontak-kontak pribadi, persuasif dan lain-lain. Dalam proses rekrutmen ini diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader guna memimpin di masa depan.

Rekrutmen politik menurut Surbakti (1992) adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang-orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Lebih lanjut Budiardjo (1983) menyatakan bahwa rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin. Terdapat dua pola pengkaderan bila ditinjau dari sudut keanggotaan yaitu keanggotaan langsung atau perorangan dan keanggotaan tidak langsung. Pada keanggotaan langsung atau perorangan partai menggunakan ranting-ranting dan cabang-cabangnya sebagai unit organisasi terkecil untuk memelihara hubungan antar anggota dan partai yang sekaligus berfungsi melaksanakan kaderisasi. Sedangkan pada keanggotaan tidak langsung partai akan menggunakan organisasi masyarakat *underbouw*-nya yang berfungsi merekrut anggota dan mencetak kader-kader serta kemudian menyalurkan ke partai politik.

disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial ; (4) aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasab yang sesuai dengan tujuan partai (ART PKS).

Untuk mencapai sasaran melalui sarana-sarana sebagaimana dipaparkan sebelumnya, PKS mencetak kadernya melalui perilaku yang Islami. Perilaku kader PKS di eksekutif dan legislatif juga turut menguatkan posisi partai ini di kalangan publik. Demikian juga tokoh-tokoh partai yang menjadi pengurus direkrut dari orang-orang yang bersih dari KKN, berakhlak mulia dan berdedikasi tinggi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Kenyataan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Arnedi Yarmen berikut ini.

> *" Bahwa kader PKS di Kota Padang direkrut melalui kalangan cendekiawan seperti dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dinilai bersih, taat beragama dan merespon proses reformasi. "*

Jika dilihat dari struktur kepengurusan partai, rata-rata pengurus partai di Kota Padang adalah sarjana yang sangat kompeten di bidangnya. Kader-kader yang simpati ini lah yang menjadi andalan atau ujung tombak dalam meraup simpati masyarakat. Dengan kata lain posisi partai di mata publik sangat tergantung oleh pola tujuan kader di tengah-tengah masyarakat.

c. Peluang dan Tantangan PKS dalam Menghadapi Pemilu 2009 di Kota Padang

Bersandar pada ketiga strategi politik yang telah dilakukan PKS dalam pemilu legislatif 2004, berikut beberapa faktor pendukung lain yang menjadikan PKS sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Kota Padang maka dapat dipetakan peluang dan tantangan yang dihadapi PKS dalam pemilu 2009.

1) Peluang

PKS harus memanfaatkan peluangnya yang tetap terbuka untuk meraih kemenangan kembali pada pemilu 1999 melalui beberapa hal berikut :

a) Faktor citra partai

PKS sesuai dengan namanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat. Untuk pencapaian tujuan tersebut dalam setiap kiprahnya selalu menjaga citra partai. PKS dicitrakan di tengah-tengah konstituennya sebagai partai reformis, partai kader, partai yang bersih dan sebagainya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Dien Syamsuddin (Sekretaris Umum MUI dan Ketua PP Muhammadiyah) berikut : " *Partai Keadilan memunculkan alternatif orientasi politik yang tidak semata-mata bermotif mencari kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.* " (Dokumentasi DPP PKS).

Hal yang senada juga diungkap oleh Eros Jarot (Budayawan), "*hingga saat ini belum ada partai reformis kecuali PKS.*" (Dokumentasi DPP PKS).

Untuk membangun citra positif partai dalam masyarakat banyak, hal yang telah dilakukan oleh PKS baik di tingkat pusat atau daerah diantaranya : *Pertama,* berusaha bersungguh-sungguh dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Komitmen PKS dalam memberantas KKN telah ditunjukkan kader-kader partai baik yang duduk di legislatif mau pun eksekutif. Masih segar dalam ingatan kita bahwa Nurmahmudi Ismael sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengembalikan dana reboisasi ke kas negara sebesar Rp. 7,8 triliun dan pengembalian atau penolakan uang suap oleh kader PKS di legislatif 1999-2004 senilai Rp. 5,3 miliar. Usaha yang sungguh dalam memberantas KKN, menyokong citra partai sebagai partai yang bersih dalam pandangan masyarakat. *Kedua,* PKS selalu menunjukkan kepedulian yang besar pada nasib rakyat terutama apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, atau musibah lainnya. Kader PKS selalu bersedia terlibat di tengah-tengah masyarakat dengan hati bersih dan ketulusan membantu. Citra positif tentu menyokong citra partai secara keseluruhan. *Ketiga,* PKS giat melakukan pencerahan politik kepada masyarakat. Mereka memperkenalkan bahwa politik tidak kotor, Islam berpolitik dengan bersih, jujur dan benar-benar mementingkan rakyat

Proses rekrutmen ini dilanjutkan dengan proses pengkaderan yang umumnya banyak terjadi di kalangan cendekia seperti mahasiswa, dosen, pelajar yang sebelumnya telah tergabung dalam beberapa wadah seperti KAMMI, HMI sampai Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Walau pun secara formal dan struktural tidak ada keterlibatan LDK namun secara pribadi-pribadi mereka banyak yang terlibat sebagai kader partai.

PKS yang didirikan oleh kalangan muda ini bila dilihat hampir semua DPW dan DPD yang tersebar di sleuruh Indonesia dimotori oleh kader yang berumur tidak lebih dari 40 tahun. Khusus DPD PKS Kota Padang sebagian besar anggotanya berumur antara 21-39 tahun.

Target partai pada kaum muda cendekia Islam ternyata cukup beralasan sebagai upaya dalam meraup jumlah suara pada pemilu legislatif 2004. Hal ini disebabkan pemuda Islam menjadi pasar potensial bagi keseluruhan partai politik yang mengusung asas Islam, walau pun dengan berbagai tampilan. Namun demikian masyarakat pedesaan seperti nelayan dan petani juga menjadi target bagi PKS dalam meraup suara. Program-program partai juga banyak dilakukan di daerah ini dan bukan hanya masyarakat perkotaan saja yang menjadi sasaran PKS.

3) Strategi Penentuan Posisi (Positioning)

Strategi penentuan posisi yang berbeda dengan partai lain dimaksudkan agar sebuah partai mendapat tempat di kalangan para pemilihnya. PKS yang lahir bersamaan dengan bergulirnya semangat reformasi politik bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tujuan yang ingin dicapai oleh PKS disimboliskan melalui lambang dua bulan sabit berwarna kuning emas, dengan garis lurus di antara keduanya. Keduanya berada di dalam satu kotak bersegi empat berwarna hitam. Kotak persegi empat

berarti keserasian. Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah. Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah. Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqamah, berani dan ketegasan yang mewujudkan kesejahteraan. Putih berarti bersih dan kesucian. Hitam berarti aspiratif dan kepastian. Kuning emas berarti kecemerlangan, kegembiraan dan kejayaan. Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan umat dan bangsa (DPP PKS, 2005).

Bila dicermati lambang partai tersebut terlihat sebuah upaya untuk membangun identifikasi diri yang berbeda dari "masa lalu." Sebagai partai yang dilahirkan oleh sebuah generasi baru, simbol-simbol yang mereka munculkan pun sedapat mungkin mewakili semangat baru tanpa harus dibayang-bayangi oleh masa lalu. Sebagai partai yang memiliki posisi partai dakwah, partai kader dan partai reformis dengan basis agama Islam maka sasaran yang harus diperjuangkan adalah : (1) terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ; (2) tegaknya "masyarakat Islam" yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya PKS menggunakan cara, sasaran dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain : (1) seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya ; (2) ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain ; (3) menggalakkan dialog konstruktif

disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial ; (4) aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasab yang sesuai dengan tujuan partai (ART PKS).

Untuk mencapai sasaran melalui sarana-sarana sebagaimana dipaparkan sebelumnya, PKS mencetak kadernya melalui perilaku yang Islami. Perilaku kader PKS di eksekutif dan legislatif juga turut menguatkan posisi partai ini di kalangan publik. Demikian juga tokoh-tokoh partai yang menjadi pengurus direkrut dari orang-orang yang bersih dari KKN, berakhlak mulia dan berdedikasi tinggi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Kenyataan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Arnedi Yarmen berikut ini.

> *" Bahwa kader PKS di Kota Padang direkrut melalui kalangan cendekiawan seperti dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dinilai bersih, taat beragama dan merespon proses reformasi. "*

Jika dilihat dari struktur kepengurusan partai, rata-rata pengurus partai di Kota Padang adalah sarjana yang sangat kompeten di bidangnya. Kader-kader yang simpati ini lah yang menjadi andalan atau ujung tombak dalam meraup simpati masyarakat. Dengan kata lain posisi partai di mata publik sangat tergantung oleh pola tujuan kader di tengah-tengah masyarakat.

c. Peluang dan Tantangan PKS dalam Menghadapi Pemilu 2009 di Kota Padang

Bersandar pada ketiga strategi politik yang telah dilakukan PKS dalam pemilu legislatif 2004, berikut beberapa faktor pendukung lain yang menjadikan PKS sebagai partai pemenang pemilu legislatif di Kota Padang maka dapat dipetakan peluang dan tantangan yang dihadapi PKS dalam pemilu 2009.

1) Peluang

PKS harus memanfaatkan peluangnya yang tetap terbuka untuk meraih kemenangan kembali pada pemilu 1999 melalui beberapa hal berikut :

a) Faktor citra partai

PKS sesuai dengan namanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat. Untuk pencapaian tujuan tersebut dalam setiap kiprahnya selalu menjaga citra partai. PKS dicitrakan di tengah-tengah konstituennya sebagai partai reformis, partai kader, partai yang bersih dan sebagainya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Dien Syamsuddin (Sekretaris Umum MUI dan Ketua PP Muhammadiyah) berikut : " *Partai Keadilan memunculkan alternatif orientasi politik yang tidak semata-mata bermotif mencari kekuasaan, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.* " (Dokumentasi DPP PKS).

Hal yang senada juga diungkap oleh Eros Jarot (Budayawan), "*hingga saat ini belum ada partai reformis kecuali PKS.* " (Dokumentasi DPP PKS).

Untuk membangun citra positif partai dalam masyarakat banyak, hal yang telah dilakukan oleh PKS baik di tingkat pusat atau daerah diantaranya : *Pertama,* berusaha bersungguh-sungguh dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Komitmen PKS dalam memberantas KKN telah ditunjukkan kader-kader partai baik yang duduk di legislatif mau pun eksekutif. Masih segar dalam ingatan kita bahwa Nurmahmudi Ismael sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengembalikan dana reboisasi ke kas negara sebesar Rp. 7,8 triliun dan pengembalian atau penolakan uang suap oleh kader PKS di legislatif 1999-2004 senilai Rp. 5,3 miliar. Usaha yang sungguh dalam memberantas KKN, menyokong citra partai sebagai partai yang bersih dalam pandangan masyarakat. *Kedua,* PKS selalu menunjukkan kepedulian yang besar pada nasib rakyat terutama apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, atau musibah lainnya. Kader PKS selalu bersedia terlibat di tengah-tengah masyarakat dengan hati bersih dan ketulusan membantu. Citra positif tentu menyokong citra partai secara keseluruhan. *Ketiga,* PKS giat melakukan pencerahan politik kepada masyarakat. Mereka memperkenalkan bahwa politik tidak kotor, Islam berpolitik dengan bersih, jujur dan benar-benar mementingkan rakyat

dan meyakini bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. *Keempat*, melakukan pembenahan di tubuh partai baik kepengurusan atau pun program. *Kelima*, mensosialisasikan citra partai melalui media elektronik dan sebagainya.

Dengan pencitraan seperti itu diharapkan pada pemilu 2009 mendatang PKS dapat mempertahankan poisinya sebagai partai unggulan.

b) Faktor keanggotaan dan sistem pengkaderan

PKS adalah salah satu partai kader. Sebagai partai kader PKS sangat mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja anggota-anggotanya. Dalam partai kader pimpinan partai biasanya sangat disiplin menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi atau saringan terhadap calon anggota partai. Begitu pula sikap tegas pemimpin partai terhadap anggota yang menyeleweng dan mengkhianati doktrin partai. Sesuai dengan kesepakatan, maka pemimpin partai akan segera memecat anggotanya. Partai kader umumnya bisa langgeng atau bertahan lama bila dibandingkan sifat kendor yang dimiliki oleh partai massa.

Untuk itu dalam proses pengkaderan tidak lah merupakan suatu hal yang mudah serta memerlukan waktu yang lama. Sebagai contoh bagi kader inti harus mengikuti tes *dauroh mahalah (DM)* yang diadakan PKS setiap tahunnya. Dalam DM ini diadakan berbagai kegiatan seperti *mukhayam* (bermalam/berkemping), *siratuqo* (perjalanan orang-orang beriman), *rihlah* (jalan-jalan atau hiking). DM berarti pelatihan untuk menjadi kader inti partai. Dalam tarbiyah islamiyah ada tiga aspek tarbiyah yakni : (1) tarbiyah ruhiyah adalah pendidikan/pelatihan yang berkenaan dengan ruh jiwa seseorang ; (2) tarbiyah fikriyah, adalah pendidikan/pelatihan yang berkenaan dengan pemikiran ; dan (3) tarbiyah jasadiyah adalah pendidikan yang berkenaan dengan jasad/jasmani atau fisik. Dengan ketiga

jenis pelatihan/pendidikan partai kader inti diharapkan kader partai mampu berkiprah sebagai kader partai panutan.

Dengan keketatan keanggotaan ditambah sistem sel yang menjadi andalan perekrutan anggota partai diharapkan dari tahun ke tahun keanggotaan PKS bisa bertambah. Sebagai gambaran dalam mengikuti pemilu 2004 keanggotaan PKS Kota Padang berjumlah 2.502 orang.

c) Faktor Kultur Sosial Masyarakat Minangkabau

Sebagai partai yang berasaskan Islam maka PKS dengan segera mendapat tempat di hati masyarakat Kota Padang khususnya dan di Sumbar pada umumnya. Sebab masyarakatnya sangat dekat dengan nilai-nilai agama Islam. Masyarakat Minangkabau yang homogen dan menganut falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ternyata cocok untuk basis perjuangan, terutama gerakan atau perjuangan yang berlandaskan Islam. Sebagaimana diketahui sebelumnya partai-partai berbasis Islam telah berjaya di Sumbar seperti Masyumi, Perti dan PSII. Ini menandakan partai politik Islam lebih populer bila dibandingkan dengan non Islam atau sekuler. Sementara itu di era reformasi, pada pemilu 1999 ternyata dari enam besar perolehan suara pemilu di Sumbar, empat diantaranya adalah partai Islam. Sedangkan untuk pemilu legislatif 2004, dari tujuh besar, ternyata tiga diantaranya adalah partai Islam yaitu PKS, PPP, dan PBB.

Kenyataan ini ditanggapi oleh Arnedi Yarmen sebagai berikut :

> *"Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan partai-partai yang berbasis Islam menang di Sumbar. Faktor yang paling menonjol adalah keislaman itu sendiri yang menjadi perekat perjuangan di samping figur tokoh, visi dan misi suatu partai."*

Disamping kultur masyarakat yang berbasis massa Islam, pemilih di Sumbar juga terkenal sebagai massa pemilih yang rasional-otonom artinya perilaku pemberian suara pemilih sangat ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan rasional seperti citra partai reformis, komitmen partai terhadap pembersihan KKN, serta

bagaimana kinerja yang ditunjukkan oleh kader partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik di legislatif mau pun eksekutif. Kondisi masyarakat seperti ini sepertinya sangat mendukung dalam upaya PKS meraih sebesar-besarnya jumlah dukungan dalam bentuk pemberian suara pada pemilu 2009 nanti.

2) Tantangan

Tantangan yang dimaksud di sini adalah beberapa faktor yang cukup strategis dan harus menjadi perhatian bagi PKS dalam mempertahankan/meningkatkan perolehan suaranya pada pemilu 2009 mendatang.

a) Faktor Komitmen Partai

PKS yang telah tersosialisasi sebagai partai yang bercitra positif di tengah-tengah masyarakat harus mampu menjaga komitmennya, terutama kesesuaian ucapan dengan perbuatan. Terlebih lagi di era reformasi seperti sekarang ini banyak sekali upaya untuk melakukan *money politic* dalam usaha mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kader partai yang duduk sebagai pejabat publik harus dapat memberikan akuntabilitasnya secara transparan terutama pada konstituennya. Dengan demikian tidak ada pembuktian bagi dalil yang menyatakan *"power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely."* Untuk itu menghadapi pemilu 2009 faktor komitmen partai menjadi krusial untuk dipertaruhkan.

b) Faktor Realigment (Pengalihan Dukungan)

Faktor ini sangat berhubungan sekali dengan kultur masyarakat Minangkabau yang *adaptable* terhadap partai-partai Islam. Makin banyak partai-partai yang mengusung asas Islam walau pun dengan *performance* yang berbeda adalah menjadi tantangan bagi PKS untuk kukuh sebagai partai dengan pencitraan positif berbeda dengan partai-partai yang berbasis Islam lainnya. Jika tidak dilakukan kekhawatiran

ancaman fragmentasi politik Islam bisa saja terjadi. Ini semua berimplikasi pada pengalihan dukungan massa kepada partai lain.

c) Faktor Dana

Faktor ini tergolong faktor klasik yang masih menjadi tantangan bagi suatu partai termasuk PKS. Persoalan "dana halal" dan uang haram sering menjadi persoalan utama tatkala menghadapi kampanye pemilu. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi PKS untuk lebih dini menyiapkan "dana halal" bagi kampanye tahun 2009 agar citra positif masyarakat terhadap partai ini terus mengalir.

B. Pembahasan

Pemilu adalah mekanisme perebutan kekuasaan secara damai di antara kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai perbedaan kepentingan. Bagi partai politik pemilu merupakan ajang untuk memperebutkan kekuasaan melalui dukungan masyarakat. Oleh karena itu pemilu sebagai instrumen yang dapat mengatur perebutan dan pergantian kekuasaan secara damai hanya akan terwujud dan menghasilkan tertib politik yang demokratis bila diselenggarakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.

Membicarakan bagaimana strategi suatu partai politik memenangkan pemilu dapat dipahami melalui konsep manajemen bisnis. Pendekatan politik dengan konsep manajemen bisnis memandang pemilu tak ubahnya bagai sebuah "pasar" bagi setiap partai politik. Untuk itu guna merebut pasar setiap partai harus merencanakan strategi pemasaran yang jitu. Strategi menurut Plano (1985) merupakan sebuah rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi *segmentasi, targetting,* dan *positioning* juga dilakukan oleh PKS Kota Padang dalam memenangkan pemilu

legislatif 2004. Dalam konsep manajemen bisnis, analisis segmentasi pasar memperlihatkan sifat dasar keberadaan dan keinginan pembeli yang bervariasi. Analisis ini memberikan peluang bagi organisasi termasuk partai politik untuk memadukan kemampuan bisnis dengan permintaan dari satu atau lebih kelompok konsumen secara selektif. Tiap segmen memiliki karakteristik yang sangat berbeda untuk segmen pasar produk (Susanto, 1999). PKS Kota Padang dalam melaksanakan strategi segmentasi partainya membagi ke dalam segmen geografik dan demografik yaitu kelompok masyarakat perkotaan, masyarakat pesisir pantai, masyarakat yang tinggal di daerah pertanian dan kalangan muda terdidik serta perempuan. Dari kelompok segmen ini maka terpilihlah kelompok kalangan muda Islam perkotaan dan cendekiawan yang menjadi *targetting* PKS untuk meraup suara konstituennya.

Strategi *targetting* PKS dirasakan cocok karena kelompok ini merupakan pelopor atau membidani lahirnya Partai Keadilan pasca reformasi politik. Namun demikian bukan berarti segmen masyarakat lainnya tidak penting.

Kaum muda muslim dan intelektual kampus diharapkan dapat direkrut menjadi kader militan partai ini. Kader militan partai adalah kader yang paling tinggi dedikasinya terhadap partai. Mereka super aktif, berdisiplin tinggi, menjadi *innercircle* dan motor penggerak kegiatan partai. Kelompok kader yang kedua adalah suporter. Suporter cukup aktif mengikuti kegiatan partai, mulai dari menghadiri rapat, aksi sosial, gerak jalan hingga demonstrasi. Kelompok kader terendah hanya sekadar sebagai pemilih *(voters)* (Ovverger dalam Johan, 2003). Bila dilihat kelompok kader yang banyak pada PKS adalah kader suporter dan kader militan.

Sosialisasi yang dilakukan kader partai adalah melalui sistem *direct selling* atau *door to door*. Kader partai yang handal mampu memasarkan partainya pada calon pemilih dan bisa membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Materi yang disosialisasikan mulai dari visi, misi, *platform* partai dan program-program yang akan dilakukan khususnya dalam kampanye pemilu sampai

kepada membantu masalah-masalah aktual yang ada di tengah-tengah masyarakat dan pada segmen-segmen tertentu. Bantuan yang diberikan hendaknya dapat menciptakan *customer satisfaction* atau kepuasan bagi pelanggan (konstituen).

Kepuasan pelanggan terhadap partai sangat tergantung kepada peran publik yang dilakukan kader partai. Menurut Saffel (1998) fungsi dasar partai guna mengisi perannya dalam pemerintahan adalah : *(1) select and support candidates ; (2) inform the public ; (3) carry the message of the people to the government ; (4) act as a watchdog over government ; (5) serve as a link between different levels and branches of government.*

Apabila dicermati pendapat Saffel dapat disusun strategi partai dalam melakukan peran publiknya yaitu : *Pertama,* dalam memilih pejabat publik, partai harus mengutamakan moralitas, kecerdasan dan keterampilan dan tidak memiliki *track record* yang jelek. *Kedua,* partai harus punya strategi dalam menginformasikan aktifitasnya kepada publik. Sesuai asas akuntabilitas, partai secara teratur wajib menginformasikan apa yang telah dikerjakannya kepada publik. Tidak hanya dilakukan menjelang kampanye pemilu. *Ketiga,* menjunjung kepentingan publik. Kader partai tidak boleh hanya pandai bicara tetapi juga harus mampu menangkap, mendengarkan dan memperjuangkan apa yang dikehendaki orang banyak. Pada PKS sudah dilakukan semacam tempat yang dikenal dengan RAR (Rumah Aspirasi Rakyat) pada ranting-ranting. *Keempat,* mengontrol kebijakan publik. Untuk itu kader partai harus dapat melayani *public interest* dengan menunjukkan dan mengoreksi kebijakan-kebijakan publik yang menyimpang. Bagi PKS sebagai partai pemenang dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang harus berusaha keras melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya agar dapat terpilih kembali di tahun 2009. *Kelima,* menjadi penghubung antar lembaga-lembaga publik sehingga tercapai iklim komunikasi dan kerjasama kondusif antara lembaga-lembaga dengan pejabat publik.

Strategi berikutnya yang dikembangkan oleh PKS Kota Padang adalah strategi penentuan posisi. PKS Kota Padang dalam menjalankan strategi ini harus menyadari bahwa PKS adalah partai kader, partai dakwah dan partai reformis yang berasaskan Islam. Melalui posisi ini partai dapat menampilkan citra positif agar dapat merebut simpati konstituen. Citra positif dapat ditampilkan melalui cara : *Pertama,* bersungguh-sungguh dalam hal pemberantasan KKN. *Kedua,* PKS Kota Padang selalu menunjukkan kepedulian yang besar pada nasib rakyat terutama apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, atau musibah lainnya. *Ketiga,* PKS Kota Padang giat melakukan pencerahan politik pada masyarakat. *Keempat,* melakukan pembenahan di tubuh partai. *Kelima,* mensosialisasikan citra partai melalui media elektronik dan sebagainya.

Dengan tersosialisasikannya citra positif partai pada masyarakat akan ikut membentuk atau menguatkan ikatan psikologis seseorang terhadap PKS. Ikatan psikologis inilah yang disebut dengan identifikasi kepartaian *(party identification).* Semakin teridentifikasi seseorang terhadap suatu partai, semakin besar peluang partai tersebut untuk memenangkan pemilu (Czudnowski, 1976).

Disamping faktor pencitraan partai, faktor lain yang menjadi peluang bagi PKS dalam memenangkan pemilu 2009 adalah faktor keanggotaan dan sistem pengkaderan yang terkenal sangat ketat ditambah dengan basis kultural penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap partai-partai Islam. Ketiga faktor ini dominan menjelaskan peluang atau keunggulan dari PKS dalam memenangkan pemilu 2009 kelak.

Setelah peluang, pendekatan politik dengan konsep manajemen bisnis juga berupaya mendeteksi tantangan-tantangan yang mungkin ada sehingga pengaruhnya dapat diantisipasi seminimal mungkin. Terdapat tiga faktor dominan yang bakal menjadi tantangan PKS untuk menjadi pemenang pemilu 2009 di Kota Padang. *Pertama,* faktor komitmen partai terhadap segala ucapan-ucapan dan janji-janji yang

telah dibuat dengan *action* atau tindakan yang telah dan bakal dilaksanakan. Terutama bagi kader yang duduk dalam berbagai jabatan publik. *Kedua*, faktor pengalihan dukungan *(realigment)* terutama oleh partai-partai yang berbasis Islam. *Ketiga*, faktor dana, yang sangat menentukan keberhasilan suatu partai dalam memenangkan pemilu termasuk PKS dalam pemilu 2009 mendatang.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beranjak dari hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi PKS dalam memenangkan pemilu legislatif 2004 terutama dalam bingkai strategi segmentasi terpusat pada lima segmen masyarakat berikut : (1) kelompok masyarakat perkotaan yaitu masyarakat yang modern dan berpendidikan ; (2) kelompok masyarakat pesisir pantai dengan mata pencaharian nelayan ; (3) masyarakat yang tinggal di daerah pertanian dengan mata pencaharian bertani ; (4) kalangan muda terdidik yang mempunyai inisiatif dan ikut andil dalam memperjuangkan reformasi ; dan (5) kaum perempuan yang potensial sebagai pemilih dengan jumlah lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki. Dari kelima segmentasi ini maka PKS memilih kelompok muda terdidik sebagai kelompok *targetting* dalam strategi pemasaran partainya. Sedangkan dalam bingkai strategi *positioning* PKS memposisikan dirinya sebagai partai kader, partai dakwah dan partai reformis.
2. Peluang PKS dalam pemilu 2009 berhubungan dengan tiga faktor dominan berikut : (1) faktor pencitraan partai ; (2) faktor keanggotaan dan sistem pengkaderan ; dan (3) faktor kultur sosial masyarakat Minangkabau. Sedangkan tantangan yang dihadapinya juga berkaitan dengan tiga faktor yaitu : (1) faktor komitmen partai ; (2) faktor *realigment* (pengalihan dukungan) ; dan (3) faktor dana.

B. Saran

1. PKS hendaknya segera mengevaluasi strategi yang telah dilakukan dalam pemilu legislatif 2004 agar dapat dijadikan bahan perefleksian diri sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi ke depan terutama dalam menyusun strategi yang tepat menghadapi pemilu 2009 mendatang. Apalagi persoalannya sangat terkait dengan dinamika kepentingan masyarakat yang sangat dinamis. Dalam konteks ini suatu partai politik termasuk PKS harus memiliki kepekaan terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai konstituen.
2. Strategi *targetting* hendaknya diperluas lagi untuk memperkuat basis massa partai dan ikatan psikologis dalam kaitannya dengan identifikasi kepartaian seseorang terhadap PKS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Amir B. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Perubahan Sosial Pada Masyarakat Minangkabau.* Laporan Penelitian IKIP Padang.

Budiardjo, Miriam. (1982). *Partisipasi Politik dan Partai Politik.* Jakarta : Gramedia.

-----. (1997). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia.

Czudnowski, Moshe M. (1976). *Comparing Political Behavior.* London : Sage Publication.

Damanik, Ali Said. (2002). *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia.* Jakarta : Teraju.

Djohan, Djohermansah, "Peran Publik Kader Partai : Kasus Partai Keadilan" dalam *Jurnal Ilmu Politik No.19, April 2003.* Jakarta : AIPI.

Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi.* Malang : YA3.

Hagopian, Mark N. (1978). *Regimes, Movements and Ideologies : A Comparative Introduction to Political Science.* New York : Longman Inc.

Haque, Rod, et al. (1993). *Political Science : A Comparative Introduction.* New York : St. Martin's Press.

Kato, Tsuyoshi terjemahan Azizah Kassim. (1989). *Nasab Ibu dan Merantau.* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kirk, Jerome & Marc L. Miller (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research.* Beverly Hills : Sage Publication.

La Palombara, Joseph. (1974). *Political Participation and Behavior.* New Jersey : Prentice Hall Inc.

Macridis, Roy C. (1967). *Political parties : Contempory Trends and Ideas.* London : Ny Eranston and London Havper Torchbooks.

Manan, Imran. (1995). *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau.* Padang : Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.

Mas'oed, Mohtar dan Collin MacAndrews (ed.). (1978). *Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.

Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Patton M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods.* Newbury Park : Sage Publication.

Plano, Jack. (1985). *Kamus Analisa Politik.* Jakarta : CV. Rajawali.

Rodee, Carlton Clymer, et-el. (1957). *Introduction to Political Science.* New York : Mc Graw-Hill Book Company, Inc.

Saffel, David C. (1998). *Civics : Responsibilities and Citizenship.* New York : Mc Graw Hill.

Sairin, Sjafri. (1996). *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau.* Yogyakarta : LKPSN.

Sihombing, Frans Bona. (1991). *Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan.* Jakarta : Sinar Grafiti.

Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta : PT. Grasindo.

Truman, David B. (1960). *The Governmental Process.* New York : Alfred & Knof, Inc.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Pemilu dan Partisipasi.* Jakarta : Gramedia.

Susanto, Djoko, "Peluang Partai Politik dalam Pemilu 1999 : Tinjauan Menurut Konsep Manajemen Bisnis" dalam *Analisis CSIS : Visi Baru, Pemilu dan Pembentukan Masyarakat Baru Tahun XXVIII, No.2 Tahun 1999.*

Widagdo. (1999). *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi.* Jakarta : PT. Golden Terayon.

Zed, Mestika. (1986). *Struktur Birokrasi Belanda dan Perkembangannya di Indonesia.* Malakah disampaikan di Padang, 20 September 1986.

B. Dokumentasi

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M-02.UM 06.08 tahun 2003 tentang Pengesahan Partai Keadilan Sejahtera, 17 Juli 2003.

AD/ART Partai Keadilan Sejahtera 2003.

Lampiran 1 : Matriks Konteks Peristiwa

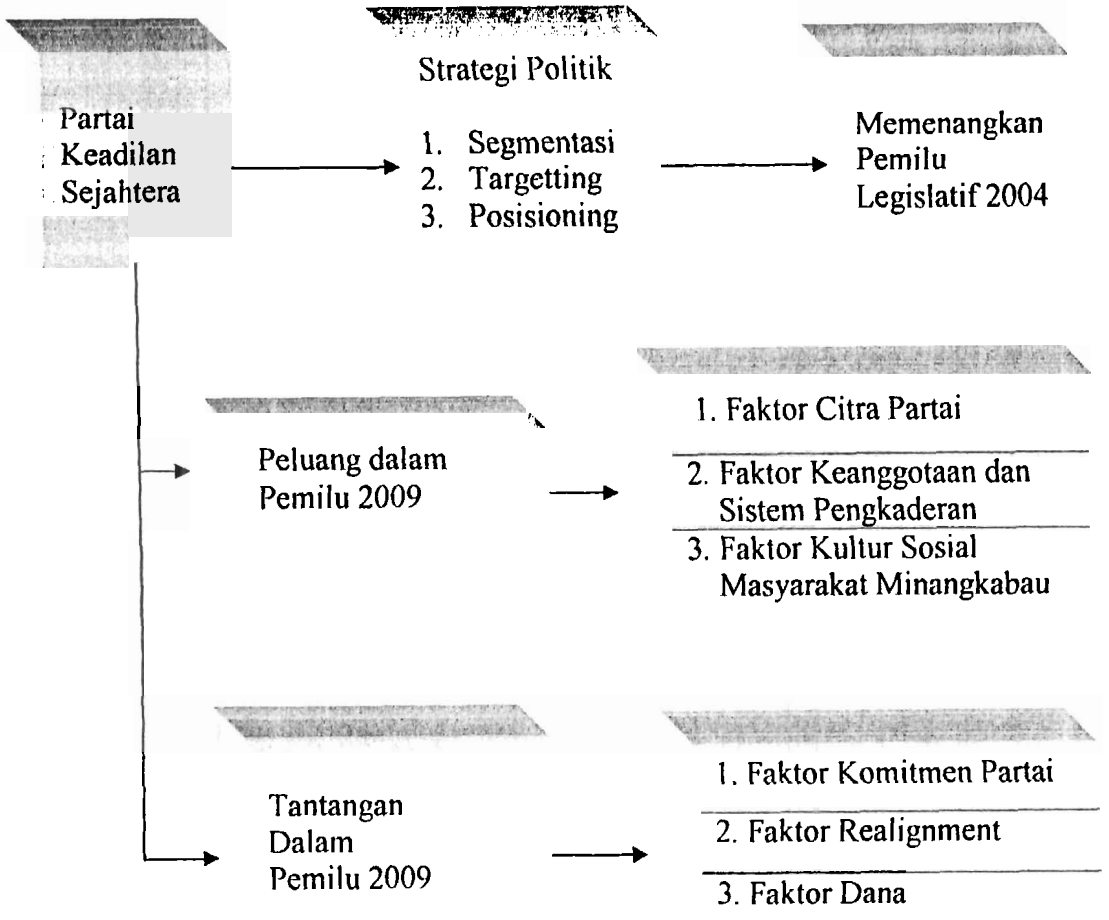

Lampiran 2 : Matrik Daftar Cek

No.	Dimensi Penelitian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Dokumentasi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu legislatif 2004	V	-	DPD PKS Kota Padang
2.	Data aktifitas PKS Kota Padang dalam melaksanakan strategi segmentasi, targetting, dan positioning.	V	-	DPD PKS Kota Padang
3.	Data tentang peluang Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2009.	V	-	Hasil analisis berdasarkan keterangan DPD PKS Kota Padang
4.	Data tentang tantangan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2009.	V	-	Hasil analisis berdasarkan keterangan DPD PKS Kota Padang

Lampiran 3 : Matrik Waktu

No.	Dimensi Penelitian	Kecenderungan	Interpretasi
1.	Dokumentasi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu legislatif 2004	Kuatnya keanggotaan partai dan organisasi partai..	PKS merupakan partai kader yang memiliki program-program khusus dalam memenangkan pemilu legislatif 2004.
2.	Data aktifitas PKS Kota Padang dalam melaksanakan strategi segmentasi, targetting, dan positioning.	Kesepakatan pimpinan dan kader partai dalam melaksanakan segala upaya untuk meraih suara terbanyak.	Keberhasilan strategi partai dengan kemenangan PKS di Kota Padang.
3.	Data tentang peluang Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2009.	Kader militan, basis massa besar dan strategi yang tepat dalam meraih suara.	Peluang besar asalkan PKS bisa menjaga citra dan komitmen partai.
4.	Data tentang tantangan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu 2009.	Terjadi realignment bila partai melanggar komitmen dan keluar dari pencitraan partai.	Tantangan bisa dieliminir asalkan partai terus berusaha menjadi partai yang memperjuangkan aspirasi massanya dan berpegang teguh pada ideologi, visi dan misi partai.